

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. BUKU

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104
- Andika Wijaya, 2016, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembauaran secara Praxis*, PT. Citraaditya Bakti, Bandung.
- H. Zainal Asikin, 2013, *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lexi J Maleonf, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Zaidatul Amin, 2012, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari Pengalam Di Negeri Lain*, Surabaya, Universitas Negeri Surabaya.

Zainal Asikin, 2105, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/PJOK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

3. SKRIPSI/TESIS

Andi Kurniawan, 2017, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penanganan Dan Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah", Skripsi Sarjana Universitas Lampung, Lampung.

Edy Hendrawan, 2015, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor Meninggal Dunia", Tesis Magister Universitas Airlangga, Surabaya.

Larassatya, 2009, “Restruksi Utang dengan Pola Konversi Utang Menjadi Saham (*Debt to Equity Swap*)”, Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok.

4. JURNAL HUKUM

Rebekka Dosma Sinaga, dkk, “*Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*”, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume I Nomor 2, Februari-Mei 2013.

Judita Damlah, “*Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*”, *Lex Crimen*, Vol. VI Nomor 2. Maret-April 2017.

Muhammad Alfi, dkk, “*Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi*”, Jurnal Hukum Diponegoro, Volume 6 Nomor 1, 2017.

M. Faisal Rahendra Lubis, “*Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseoran Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*”, Jurnal Hukum Kaidah.

Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “*Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Hukum Digantara, Volume 7 Nomor 1, September 2016.

5. INTERNET

Fairus Harris, “*2 Tahapan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*”, <https://bplawyers.co.id/2017/07/10/2-tahapan-dalam-proses-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-PKPU/> , dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2021 Jam 11:08

Monica Wareza, “*Astaga! Nasabah Sebut Gagal Bayar Kresna Life Capai Rp 6,4 T*”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200825164145-17-181908/astaga-nasabah-sebut-gagal-bayar-kresna-life-capai-rp-64-t>, dikunjungi pada tanggal 31 Maret 2022 Jam 10:09

Sorta Tobing, “*Tak Transparan & Salah Kelola jadi Biang Soal Gagal Bayar Kresna Life*”,

<https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/5f475e97a95c6/tak-transparan-salah-kelola-jadi-biang-soal-gagal-bayar-kresna-life>, dikunjungi pada 31 Maret 2022 Jam 11:16.

